

Fungsi Akuntansi Syariah pada BMT-BMT di Tangerang Selatan

SRI INDARTI

Prodi Akuntansi S1 Universitas Pamulang

*Email : ukhti.indarti@gmail.com

ABSTRACT

One of the important agenda of Muslims is the problem of poverty alleviation. One of the Islamic financial institutions present the most strategic and functional to alleviate poverty ummah is BMT (Baitul Mal wat Tanwil). Accounting as one of the tools that are necessary in a financial institution is functionally a means of accountability and resources must be based on sharia.

This study was done in order to determine how the characteristics and accounting functions of sharia in the BMT-BMT in South Tangerang, this study included 37 respondents (managers, administrators, supervisors) of 17 BMT in Tangerang south. The results of this study indicate BMT is growing rapidly in South Tangerang in the last five years and it is known that Islamic accounting functions in BMT in South Tangerang is the first, the accounting function as a form of sharia, both vertical and horizontal, both accounting functions of sharia as a source of information for decision-making related closely with the availability of Islamic financial reports and human resources.

Keywords: Baitul Mal Wat Tanwil, Islamic Accounting Functions, The purpose of Islamic Financial Report, Descriptive Statistics

1. PENDAHULUAN

Salah satu agenda penting umat Islam adalah masalah pengentasan kemiskinan. Bahkan sebagian besar umat Islam, khususnya para pedagang kecil, masih terjerat sistem ekonomi ribawi.

Salah satu lembaga keuangan Islam masa kini yang paling strategis dan fungsional untuk mengentaskan kemiskinan umat, adalah BMT (Baitul Mal wat Tanwil). Dalam satu dasawarsa pertama (1995 – 2005), di Indonesia telah tumbuh dan berkembang lebih dari 3.300 BMT, dengan asset lebih dari Rp 1,7 triliun.

Salah satu piranti yang sangat diperlukan adalah akuntansi, yang dapat memberikan sumbangan dalam pertanggungjawaban dan penyediaan informasi yang terkait dengan operasional yang dijalankan oleh BMT dan selalu berjalan

dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dimana secara fungsional akuntansi merupakan sarana pertanggungjawaban dan media informasi, sehingga akuntansi menjadi hal yang sangat penting keberadaannya dalam sebuah institusi keuangan.

Allah berfirman “ Hai, orang-orang yang beriman, apabila kami bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar” (QS. Al Baqarah ayat 282). Allah juga berfirman “ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (QS. An Nisa ayat 135). Firman Allah tersebut menerangkan bahwa nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian BMT (Baitul Maal-Wat Tamwil)

Secara etimologis, istilah baitul mal berarti rumah uang, sedangkan baitul tamwil mengandung pengertian rumah pembiayaan. Oleh karena itu aspek “Baitul Maal” memiliki kesamaan dengan Badan Amil Zakat, oleh karenanya dalam aspek ini didorong agar dapat berfungsi secara proporsional sebagai lembaga yang melakukan pengumpulan zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf yang merupakan sumber-sumber dana sosial keagamaan dan sekaligus meningkatkan kehidupan fuqora wal masakin sesuai ketentuan Dienul Islam, hal ini dapat dijadikan landasan hukum UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat. Bahwa, dari aspek “Baitul Tamwil” ditekankan sebagai institusi bisnis berdasarkan syariah yang kegiatan usahanya pada sektor keuangan yakni usaha bersifat kemitraan (simpan pinjam) dengan pola syariah dan oleh karena itu para pendiri dan pengelola BMT harus memahami tentang keuangan syariah dan/atau akad-akad syariah dan yang paling mungkin pada saat ini badan hukum “Koperasi” sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, baik Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) maupun Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan pola syariah

2.2 Akuntansi Syariah

Akuntansi sebenarnya merupakan domain “muamalah” dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini, maka Allah SWT memberikan tempat dalam kitab suci Al-Qur’an, surat Al Baqarah ayat 282. Penempatan ayat ini juga unik dan relevan dengan sifat komoditif ekonomi. Ia ditempatkan dalam surat Sapi Betina sebagai lambang komoditif ekonomi. Surat ke-2 yang dapat dianalogkan dengan “double entry” atau sifat berpasangannya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah” (QS. Adz-Dzariyat:49). Dan juga pada surat Yasiin ayat 36 inilah beberapa kemungkinan yang sebenarnya hanya Allah yang mengetahui. Karena akuntansi sifatnya urusan muamalah, maka pengembangannya diserahkan pada kebijakan manusia.

Beberapa definisi akuntansi dapat disajikan, diantaranya :

APB (Accounting Principle Board) Statement No. 4 diterjemahkan oleh Harahap (2007) mendefinisikan sebagai berikut “akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif”

Pengertian Akuntansi Syari’ah jika ditinjau dari secara etimologi , kata akuntansi berasal dari bahasa inggris, accounting, dalam bahasa Arabnya disebut “ Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.

Menurut Zaid (2000) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

”Muhasabah, yaitu suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari’at dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat”.

Nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syari’ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja sudah menjadi prinsip dasar yang operasional dalam prinsip akuntansi syariah. Ketiga prinsip tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah:282. (Al-Qur`an dan Terjemahannya, 2009). Akuntan muslim harus meyakini bahwa Islam sebagai way of life (Q.S. Al Imran : 85). Akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil, dan dapat dipercaya (Q.S. An-Nisa : 135). Akuntan bertanggung jawab melaporkan semua transaksi yang terjadi (muamalah) dengan benar, jujur serta teliti, sesuai dengan syariah Islam (Q.S. Al-Baqarah : 7 – 8). Dalam penilaian kekayaan (aset), dapat digunakan harga pasar atau harga pokok. Keakuratan penilaiannya harus dipersaksikan pihak yang kompeten dan independen (Q.S Al-Baqarah : 282). Standar akuntansi yang diterima umum dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Paham akuntansi konvensional hanya mementingkan kaum pemilik modal (kapitalis), sedangkan akuntansi syariah bukan hanya mementingkan manusia saja, tetapi juga seluruh makhluk di alam semesta ini.

Kerangka Dasar Akuntansi Keuangan

Kerangka dasar akuntansi keuangan versi AAO-IFI dituangkan dalam SFA No. 2 sama halnya dengan PSAK NO. 101 Tidak seperti halnya akuntansi keuangan konvensional, akuntansi syariah menuntut lebih banyak bentuk laporan sebagai berikut:

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan arus kas

4. Laporan laba ditahan/Ekuitas
5. Laporan perubahan dalam investasi terbatas
6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sosial
7. Laporan sumber dan penggunaan dana dalam qardh
8. Catatan atas laporan keuangan

Empat laporan pertama adalah unsur-unsur laporan keuangan yang sudah dikenal selama ini secara konvensional, sedangkan tiga terakhir bersifat khas. Ketiga laporan yang terakhir ini muncul akibat perbedaan peran dan fungsi entitas Islam, dibandingkan entitas konvensional.

Dan suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Sesuai dengan tujuan laporan keuangan syariah (Harahap, Wiroso & Yusuf : 2007), yaitu :

- a. Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan.
Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional.
- b. Menilai prospek arus kas
Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor/pemilik dana, kreditur dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat dan ketidakpastian dalam penerimaan kas dimasa depan atas deviden, bagi hasil, dan hasil dari penjualan, pelunasan, dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman.
- c. Informasi atas sumber daya ekonomi
Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumberdaya ekonomis bank (economic resources), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik sama, dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya ekonomi tersebut.
- d. Kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip syariah
Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
- e. Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab lembaga keuangan terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat dan
- f. Pemenuhan fungsi social.
Laporan keuangan memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi social entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

2.3 Akuntansi Syariah pada BMT

Banyak kekhasan dari lembaga BMT, yang pertama adalah fungsi dari lembaga ini untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana bebas riba. Kedua, dalam prakteknya mayoritas nasabah BMT berasal dari sektor informal, sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa BMT menjadi alternatif akses pendanaan dari usaha informal yang tidak dapat berhubungan langsung dengan lembaga keuangan Islam. Ketiga, potensi dana yang mungkin diserap BMT sangat besar (penduduk muslim merupakan sumber modal potensial). Keempat, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang sistem operasionalnya didasarkan pada prinsip ekonomi Islam. Sesuai dengan ciri diatas, maka prinsip operasional BMT harus bebas dari riba, berorientasi sosial (membantu kaum lemah dan dhuafa) serta mampu mendorong masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam.

Secara kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana BMT berbeda dengan Bank Syariah seperti dijelaskan di atas namun secara akuntansi BMT sama dengan Bank Syariah. BMT mekanisme kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non syariah. Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah :

- a. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
- b. Menjalankan aktifitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal
- c. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
- d. Larangan menjalankan monopoli
- e. Bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

Sebagaimana layaknya suatu lembaga syariah juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kepada semua sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep bebas bunga, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga syariah.

Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (rabbul maal) yang menyimpan uangnya dilembaga, lembaga selaku pengelola dana (mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan. Saat ini IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sudah mengeluarkan PSAK Akuntansi Keuangan Syariah No. 100 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang berisi tentang Tujuan Akuntansi Keuangan, Tujuan Laporan Keuangan, Asumsi Dasar atas Sistem Pencatatan dasar Akrua, Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan dan Unsur Laporan Keuangan. PSAK No. 101-106 berisi tentang Pengakuan dan Pengukuran.

Adapun karakteristik produk-produk syariah seperti; Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Wadiah, Qardh, Sharf serta pengakuan dan pengukuran zakat. PSAK No. 101-106 juga berisi penyajian komponen-komponen laporan keuangan bank syariah dan juga pengungkapan umum laporan keuangan, serta tanggal efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga syariah.

Produk-produk BMT:

- a. Murabahah (Pembiayaan dengan Marjin)
- b. Ba'i Bitsaman Ajil (Transaksi jual beli dengan harga tangguh)
- c. Mudharabah
- d. Musyarakah
- e. AlQardhul Hasan (Pembiayaan Kebajikan)

2.4 Fungsi Akuntansi Syariah

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fungsi adalah kegunaan suatu hal. Berikut beberapa pengertian dari fungsi akuntansi :

Dikutip oleh Harahap (2007), APB (Accounting Principle Board) Statement No. 4 mendefinisikan sebagai berikut : "akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif"

Di pandang dari segi aspek informasi menurut Supriyono (1993) akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut : "Akuntansi adalah aktivitas yang menghasilkan jasa yaitu berfungsi menyajikan informasi kuantitatif yang pada dasarnya bersifat keuangan dari suatu satuan usaha atau organisasi tertentu, informasi tersebut akan dapat dipakai oleh pihak eksternal maupun pihak internal untuk pengambilan keputusan dengan memilih beberapa alternatif".

Menurut Mathews & Parera (1996): "Sebenarnya, laporan keuangan tidak dapat memiliki tujuan hanya orang-orang yang menyebabkan pernyataan yang akan dihasilkan dan siapa yang menggunakannya dapat memiliki tujuan". Lebih jauh lagi menurut Mathews & Parera (1996): Apa yang sering disebut sebagai tujuan laporan keuangan benar-benar fungsi laporan keuangan"

Dengan demikian berangkat dari pemikiran Mathews & Parera (1996) , sebetulnya apa yang menjadi tujuan laporan keuangan, merupakan tujuan dan fungsi akuntansi sendiri.

Menurut Harahap (1997) Jika Akuntansi yang sekarang (konvensional) tidak ingin di tinggalkan oleh penggunanya sehingga akuntansi harus merubah orientasi dan fungsinya. Fungsi akuntansi yang selama ini adalah " decision making facilitating function" kearah lain yang bermanfaat . sehingga muncullah fungsi Accauntability yang benar walaupun itu telah ada sejak lahirnya akuntansi.

Haniffa (2002) dikutip oleh Harahap (2008) mengemukakan perlunya akuntabilitas akuntansi. Menurut beliau dari aspek akuntabilitas ini informasi yang dibutuhkan adalah:

- a. Amanah : memproduksi barang dan jasa yang halal sebagaimana ketentuan Allah

- b. Memenuhi kewajiban kepada Allah dan manusia
- c. Mengejar laba sesuai syariah
- d. Mencapai tujuan perusahaan
- e. Adil kepada karyawan dan masyarakat
- f. Meyakinkan bahwa kegiatan perusahaan tidak merusak lingkungan
- g. Menganggap tugas adalah berdimensi dari ibadah

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Maman (2002) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah (Umar: 1999). Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Menurut Vredendregt (1987) Studi kasus ialah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, di mana tujuannya adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai penelitian yang eksploratif dan deskriptif.

Analisis data yang digunakan adalah Statistik deskriptif adalah suatu metode statistika yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Analisis deskriptif meliputi upaya penelusuran dan pengungkapan informasi yang relevan yang terkandung dalam data dan penyajian hasilnya dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana, yang pada akhirnya mengarah pada keperluan adanya penjelasan, yang dalam hal ini adalah menjelaskantentang karakteristik & fungsiAkuntansiSyariah pada BMT-BMT di Tangerang Selatan.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian berasal dari literatur dan data primer dengan mengumpulkan informasi, melalui kuesioner , wawancara dan observasi langsung untuk mendapatkan informasi mengenai fungsi Akuntansi Syariah yang diterapkan di BMT-BMT di Tangerang Selatan. Oleh karena itu penulis membuat penelitian ini dengan judul “Fungsi Akuntansi Syariah BMT-BMT di Tangerang Selatan”.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi BMT-BMT yang berlokasi di Tangerang Selatan dan para responden adalah pengelola, dewan pengurus dan dewan pengawas di BMT-BMT tersebut waktu penelitian pada November 2010 s/d Januari 2011.

Dalam pembahasan penelilitian ini, statistik deskriptif yang digunakan adalah gambar berupa diagram dan tabel untuk menggambarkan bagaimana

karakteristik BMT-BMT tersebut dan untuk mengetahui fungsi pertanggungjawaban (accountability) dan fungsi akuntansi syariah sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan (decision making). Dengan bantuan perangkat lunak SPSS dan MS.Excel.

3.2 Metode

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden (pengelola, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas) berpedoman pada kuesioner yang telah dibuat sebelumnya dan observasi ke beberapa BMT yang menjadi responden.

Pemilihan responden dalam penelitian dilakukan berdasarkan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa responden adalah individu pembuat keputusan/kebijakan atau pemberi masukan kepada para pengambil keputusan/kebijakan.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer hasil wawancara (in dept interview) dengan berpedoman dengan kuesioner yang telah disiapkan terlebih dahulu dan observasi langsung ke BMT. Dan yang menjadi responden adalah para Pengelola, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas BMT-BMT di Tangerang Selatan provinsi Banten. Dengan jumlah BMT yang menjadi objek penelitian sebanyak 17 BMT yang berdomisili di Tangerang Selatan.

3.3 Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Statistik deskriptif adalah suatu metode statistika yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Analisis deskriptif meliputi upaya penelusuran dan pengungkapan informasi yang relevan yang terkandung dalam data dan penyajian hasilnya dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana, yang pada akhirnya mengarah pada keperluan adanya penjelasan (Aunuddin, 1989)

Dalam pembahasan penelitian ini, statistika deskriptif yang digunakan adalah tabulasi-tabulasi, grafik, dan diagram ini akan didapatkan informasi awal tentang karakteristik dan fungsi pertanggungjawaban (accountability) di lihat dari 7 aspek akuntabilitas akuntansi pada BMT-BMT di Tangerang Selatan dan fungsi akuntansi syariah sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan (decision making) dilihat dari tujuan laporan keuangan syariah.

Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut: (Miles dan Huberman, 1992)

- a. Pengumpulan informasi, melalui wawancara, kuesioner maupun observasi langsung, internet research, pustaka.
- b. Reduksi. Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Penyajian. Setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk tabel dengan menggunakan SPSS, ataupun uraian penjelasan.
- d. Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan

Kuesioner yang diajukan kepada responden semata-mata sebagai bahan kajian yang mendasar untuk membuat kesimpulan. Bagaimanapun pendapat

banyak orang merupakan hal penting meskipun tidak dijamin validitasnya. Semakin banyak informasi, maka diharapkan akan menghasilkan data yang sudah tersaring dengan ketat dan lebih akurat.

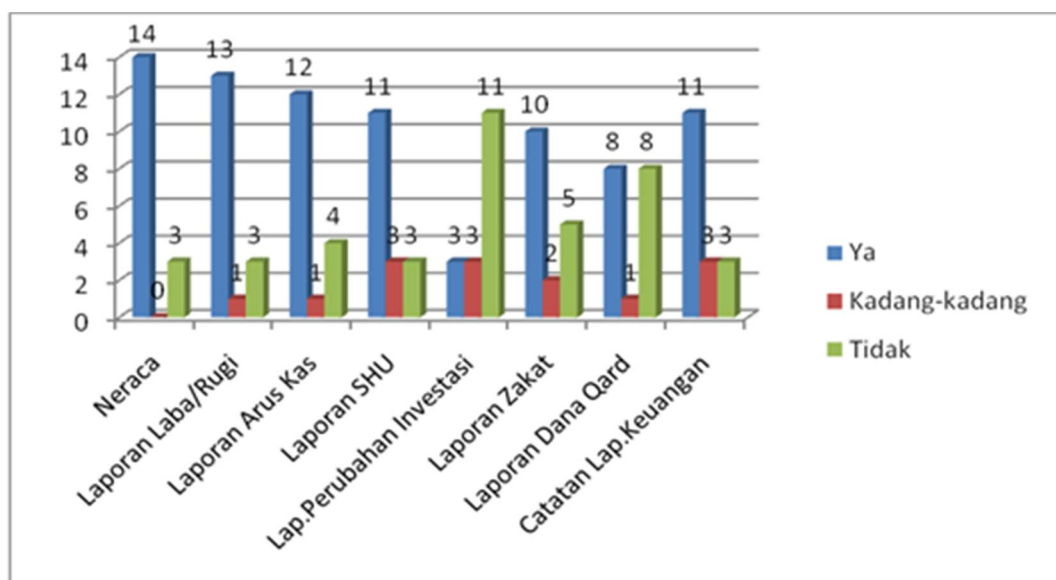
4. PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik BMT-BMT di Tangerang Selatan

Responden dalam penelitian ini adalah pengelola, dewan pengurus dan dewan pengawas sebanyak 40 orang dari 17 BMT yang bedomilisi di kabupaten Tangerang Selatan propinsi Banten. Berikut beberapa karakteristik dari BMT-BMT tersebut. BMT di Tangerang Selatan berkembang dengan pesat lima tahun terakhir ini (2006 s/d 2010) dan yang menjadi karakteristik BMT di Tangerang Selatan sebagai berikut: telah memiliki rata-rata 5 produk tabungan dan 3 produk pembiayaan berbasis syariah, aset berjumlah 200 juta s/d 1 milyar rupiah sudah memenuhi. Dan berdasarkan status legalitas (badan hukum) sebanyak 4 BMT telah berbadan hukum sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan sebagian besar BMT sebanyak 13 (76%) belum berstatus hukum KJKS, disebabkan BMT-BMT tersebut belum mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementrian Negara Koperasi dan UKM yaitu ketersediaan Strukur DPS dan Sistem Operasional Prosedur sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

4.2 Komposisi Penyediaan Laporan Keuangan Syariah BMT-BMT di Tangerang Selatan

Gambar 4.1 : Komposisi Penyediaan Laporan Keuangan Syariah BMT-BMT di Tangerang Selatan

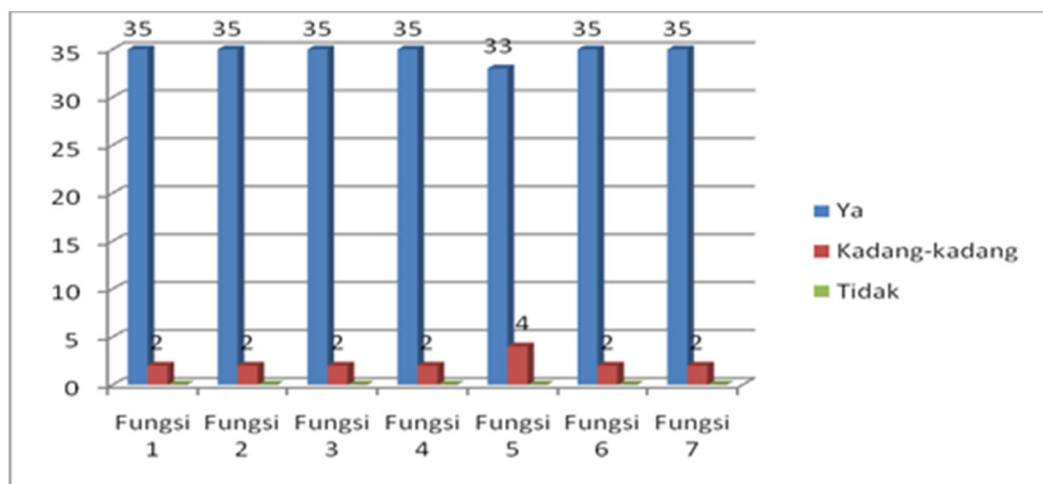


Berdasarkan gambar 4.1, dari 17 responden Komposisi penyediaan laporan keuangan syariah dari 8 laporan keuangan syariah menurut PSAK NO.101 dari 17 BMT di Tangerang Selatan ketersediaan laporan keuangan syariah diantaranya Neraca (82,4%), Laporan Laba/Rugi (76,5%), Laporan Arus Kas (70,6%), Laporan SHU (64,7%), laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sosial (58,8%), Catatan atas Laporan Keuangan (64,7%), sedangkan laporan sumber dan penggunaan dana dalam qard (47,1%), Laporan perubahan dalam investasi (17,6%) baru sebagian kecil BMT di Tangerang Selatan yang menyediakan dua laporan tersebut.

4.3 Fungsi akuntansi syariah sebagai pertanggungjawaban (accountability)

Gambar 4.2. dibawah ini adalah bagan yang menunjukkan apa yang menjadi aspek utama dari fungsi akuntansi syariah sebagai pertanggungjawaban (accountability) dilihat dari 7 aspek akuntabilitas akuntansi yang dipilih oleh 37 responden (pengelola, dewan pengurus dan dewan pengawas) dari 17 BMT yang bedomilisi di kabupaten Tangerang selatan, sebagai berikut :

Gambar 4.2. Aspek akuntabilitas akuntansi dari Fungsi akuntansi syariah pertanggungjawaban (accountability) pada BMT-BMT di Tangerang Selatan



Keterangan :

Fungsi 1: Amanah, memproduksi barang dan jasa yang halal sebagaimana ketentuan Allah

Fungsi 2 : Memenuhi kewajiban kepada Allah dan manusia

Fungsi 3 : Mengejar laba sesuai syariah

Fungsi 4 : Mencapai tujuan perusahaan

Fungsi 5 : Adil kepada karyawan dan masyarakat

Fungsi 6 : Meyakinkan bahwa kegiatan perusahaan tidak merusak lingkungan

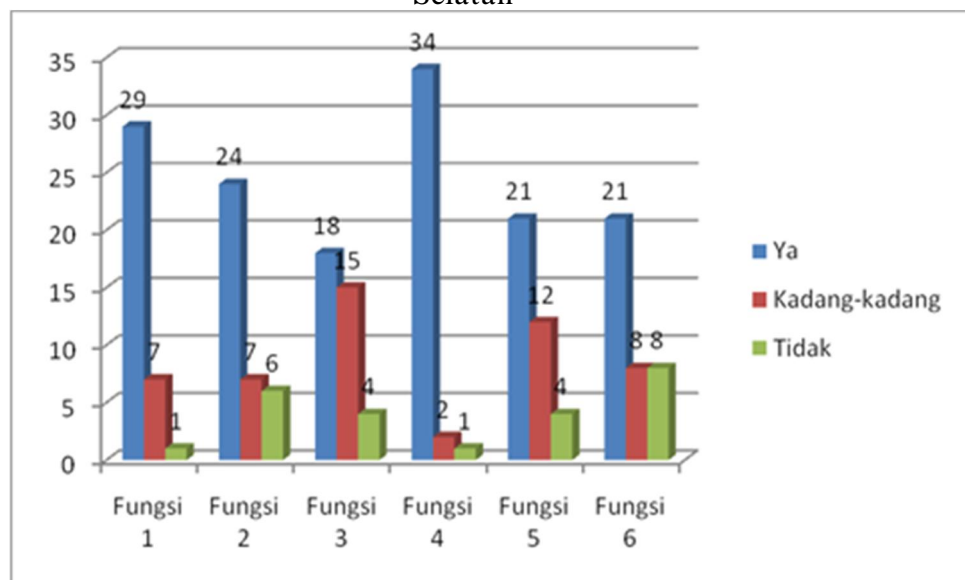
Fungsi 7 : Menganggap tugas adalah berdimensi dari ibadah

Terlihat pada gambar 4.2 terlihat bahwa mayoritas responden (95%) menyatakan Fungsi Akuntansi Syariah sebagai pertanggungjawaban (accountability), baik accountability horizontal (manusia & alam) maupun accountability vertikal (Allah SWT) pada BMT-BMT di Tangerang Selatan sejalan dengan akuntabilitas akuntansi menurut pendapat Mathew & Perrera (2006) sebesar 95% yaitu sebagai berikut : Amanah dalam memproduksi barang dan jasa yang halal sebagaimana ketentuan Allah, memenuhi kewajiban kepada Allah dan manusia, mengejar laba sesuai syariah mencapai tujuan perusahaan, adil kepada karyawan dan masyarakat, meyakinkan bahwa kegiatan perusahaan tidak merusak lingkungan, dan menganggap tugas adalah berdimensi dari ibadah.

4.4. Fungsi Akuntansi Syariah sebagai Sumber Informasi untuk Pengambilan Keputusan (Desicion Making)

Berikut ini adalah hasil dari kuesioner Selatan dari 40 responden sebanyak 37 responden (pengelola,dewan pengurus,dewan pengawas) dari 17 BMT di Tangernag Selatanyang menjawab dengan secara keseluruhan pertanyaan yang diajukan di kuesioner mengenai fungsi akuntansi syariah sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan (decision making) di lihat dari tujuan laporan keuangan syariah,

Gambar 4.3. Fungsi akuntansi syariah sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan (Desicion Making) pada BMT-BMT di Tangerang Selatan



Terlihat pada gambar 4.3 Fungsi akuntansi syariah sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan laporan keuangan syariah (Harahap, wiroso, Yusuf.M:2007) kemudian dikaitkan dengan ketersediaan laporan keuangan syariah, adalah sebagai berikut :

- Fungsi 1 : Fungsi akuntansi syariah untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan (78%) berbanding lurus dengan ketersediaan laporan keuangan syariah neraca (82,4%), Laporan Laba/Rugi (76,5%)
- Fungsi 2 : Fungsi akuntansi syariah untuk menilai prospek arus kas (64%), berbanding lurus dengan ketersediaan laporan keuangan syariah Laporan Arus Kas (70,6%)
- Fungsi 3 : Fungsi akuntansi syariah untuk mendapatkan informasi atas sumber daya ekonomi (47%), tidak berbanding lurus dengan laporan keuangan neraca (82,4%), dan Laporan perubahan dalam investasi (17,6%) karena dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kebijakan dewan pengurus/dewan pengawas.
- Fungsi 4 : Fungsi akuntansi syariah sebagai kepatuhan BMT terhadap prinsip syariah (91%) berbanding lurus dengan ketersediaan laporan keuangan syariah neraca (82,4%), Laporan Laba/Rugi (76,5%), ketersediaan laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sosial (58,8%) dan laporan sumber dan penggunaan dana dalam qard (47,1%).
- Fungsi 5 : Fungsi akuntansi syariah sebagai evaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas terhadap amanah kepada pihak ke tiga (58%) dengan tidak berbanding lurus dengan ketersediaan laporan keuangan neraca (82,4%), Laporan Laba/Rugi (76,5%) dan Laporan perubahan dalam investasi (17,6%) karena dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kebijakan dewan pengurus/dewan pengawas
- Fungsi 6 : Fungsi akuntansi syariah untuk mendapatkan informasi pemenuhan sosial (57%) berbanding lurus dengan ketersediaan laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sosial (58,8%) dan laporan sumber dan penggunaan dana dalam qard (47,1%).

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, ada beberapa hal yang mempengaruhi jawaban kadang-kadang atau tidak dari para responden yaitu sebagai berikut :

- a. Para pengambil keputusan di BMT dalam pengambilan keputusan terkadang lebih mengutamakan pertimbangan/alasan pribadi daripada menggunakan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan syariah.
- b. Terdapat aspek-aspek selain keuangan yang lebih diutamakan dalam pengambilan keputusan misalnya legalitas, portofolio dan kepentingan investor.
- c. Sumber daya manusia dan teknologi yang kurang memadai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan fungsi akuntansi syariah pada BMT-BMT di Tangerang Selatan. Studi kasus ini melibatkan 40 responden (pengelola, dewan pengurus, dewan syariah) dari 17 BMT yang berdomisili di kabupaten Tangerang Selatan propinsi Banten. Kesimpulan yang diperoleh dari pengolahan dan analisa data diatas adalah sebagai berikut :

- a. BMT di Tangerang Selatan berkembang dengan pesat lima tahun terakhir ini (2006 s/d 2010) dan yang menjadi karakteristik BMT di Tangerang Selatan sebagai berikut : telah memiliki rata-rata 5 produk tabungan dan 3 produk pembiayaan berbasis syariah, aset berjumlah 200 juta s/d 1 milyar rupiah sudah memenuhi. Dan berdasarkan status legalitas (badan hukum) baru sebanyak 4 BMT dari 17 BMT di Tangerang selatan yang telah berbadan hukum sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), hal ini disebabkan BMT-BMT tersebut belum mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementrian Negara Koperasi dan UKM yaitu ketersediaan Strukur DPS dan Sistem Operasional Prosedur sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.
- b. Secara garis besar fungsi akuntansi syariah pada BMT di Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Pertama, fungsi akuntansi syariah sebagai pertanggungjawaban (accountability), baik accauntability horizontal (manusia & alam) maupun accauntability vertikal (Allah SWT) pada BMT-BMT di Tangerang Selatan sejalan dengan akuntabilitas akuntansi menurut pendapat Mathew & Perrera (2006) yaitu sebagai berikut : Amanah dalam memproduksi barang dan jasa yang halal sebagaimana ketentuan Allah, memenuhi kewajiban kepada Allah dan manusia, mengejar laba sesuai syariah mencapai tujuan perusahaan, adil kepada karyawan dan masyarakat, meyakinkan bahwa kegiatan perusahaan tidak merusak lingkungan, dan menganggap tugas adalah berdimensi dari ibadah.
 - 2) Kedua, fungsi akuntansi syariah sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan (desicion making) syariah sebagai : pengambilan putusan investasi dan pembiayaan, menilai prospek arus kas, informasi atas sumber daya ekonomi, kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, evaluasi pemenuhan tanggung jawab terhadap pihak ketiga, pemenuhan fungsi social, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan laporan keuangan syariah dan sumber daya manusia.

Implikasi hasil terhadap praktek, BMT sebagai sebuah lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat, ketidakjelasan bentuk badan hukum BMT dapat menyebabkan BMT kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan investor oleh karena itu penulis menyarankan kepada BMT untuk mengurus status badan hukumnya sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah sesuai Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha

koperasi jasa keuangan syariah, guna memenuhi persyaratannya maka BMT perlu memaksimalkan fungsi akuntansi syariah dengan teknologi informasi (software akuntansi) yang dapat memenuhi kebutuhan akan penyediaan laporan keuangan syariah secara lengkap dan mudah dipahami. Demikian juga halnya dengan praktisi khususnya pengurus BMT, diharapkan untuk selalu meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan (continuous profesional education) tidak hanya di bidang akuntansi syariah tetapi juga di bidang manajemen, perpajakan dan hukum perdata mengenai perikatan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang ada. Mengacu pada kesimpulan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, beberapa keterbatasan dalam penelitian ini perlu diketahui sehingga peneliti selanjutnya dapat lebih meningkatkan hasil penelitiannya, yaitu :

- a. Responden pada penelitian ini belum mencakup semua BMT yang berdomisili di Tangerang Selatan, karena belum adanya data yang akurat mengenai daftar nama semua BMT di Tangerang Selatan, sehingga penelitian ini tidak dapat dikatakan representasi dari seluruh BMT yang berdomisili di Tangerang Selatan.
- b. Penulis tidak melakukan wawancara secara intensif kepada semua responden dan observasi di semua BMT yang menjadi responden, sehingga ada kemungkinan diperoleh informasi yang kurang berimbang.

5.3 Saran Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya adalah :

- a. Penelitian selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk memperluas sampel responden tidak hanya pada BMT di sebuah kabupaten (Tangerang Selatan) tetapi diperluas ke tingkat propinsi di wilayah Indonesia.
- b. Untuk memperoleh informasi yang lebih berimbang dan objektif tentang fungsi akuntansi syariah, perlu memperluas kelompok responden selain para pengelola, pengurus dan dewan pengawas dengan melibatkan para stockholders dan pihak ketiga lainnya, serta melakukan wawancara dan observasi yang lebih intensif terhadap para pihak pengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2004). Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution's. Bahrai, AAOIFI
- Abduh, M., Hafidbuddin, D., & Ibdalsyah. (2006). Penilaian pengguna jasa bank terhadap perbankan syariah (Studi kasus penggunaan Jasa Bank Kota Bogor). *Tazkia Islamic Finance & Business Review*.
- Adriani. (2005). Baitul Maal Wat Tamwil (Konsep dan Mekanisme di Indonesia) <http://idb2.wikispaces.com/file/view/rd2012.pdf>
- Ach. Syaiful Hidayat. (Agustus 2003). Penerapan Akuntansi Syariah pada Koperasi BMT Sarana Dakwah Muslim Malang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Balance*, Volume 1, Halaman 115-130. <http://digilib.umm.ac.id>
- Al-Quran dan Terjemahannya. (2009). Departemen Agama RI. Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema
- Antonio, M.S (2002), Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press
- Arikunto, S. (2005), Manajemen Penelitian, edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta
- Ar-Rifa'i, M.N. (1999). Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir. Jakarta: Gema Insani Press
- Aunuddin. (1989). Analisis Data. PAU Ilmu Hayat IPB Bogor. <http://jma.mb.ipb.ac.id/uploads/pdf/maret2005-anyratnawati.pdf>
- Azis, A.M. (2008) Tata Cara Pendirian BMT versi e-book . Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (pkes Publising). pkesinteraktif.pkes.org/download/bmt_pkes_secure.pdf
- Bank Indonesia. (2008). Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Jakarta : Bank Indonesia
- Baskerville, P. (2009). Basic Accounting Concepts - Definitions 1. January 5). American Psychological Association (APA) Publication Manual: http://cnx.org/content/m19140/1.1/content_info
- Direktorat Perbankan Syariah-BI & IPB. (2004). Laporan Akhir: Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di wilayah Sumatera Selatan. Direktorat Perbankan Syariah – Bank Indonesia yang bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor
- Gambling, Trevor and Rifaat AA Karim. (1991). Business and Accounting Ethics in Islam. London: Mansell.
- Harahap, S.S., Wiroso, Yusuf. M. (2007). Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi Tahun 2007. Jakarta: LPFE Usakti
- Harahap, S.S. (2007). Teori Akuntansi Edisi Revisi Tahun 2007. Jakarta: Rajawali Press
- _____. (2008). Teori Akuntansi Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. (1997). Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. (2008). Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah. Jakarta: Pustaka Quantum
- _____. (2000). Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam. Jakarta: Pustaka Quantum

- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101-111 (Akuntansi Syariah). Jakarta : IAI
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>
- Keller, Gerald & Warrack,B. (2003). Statistics for Management and Economics Duxbury.USA
- Maman, Kh. U.(2002). Menggabungkan Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Bogor: IPB
- Mathew,M.R., Perera.M.H.B. (1996). Accounting Theory and Development. International.Thomson Business Press; 3rd edition
- MSI PPs UII Dr. Amir Mu'llim sebagai ketua Tim Peneliti Ekonomi Islam. Profesionalisme Praktisi BMT di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Redaksi msi-uii.net
- Muawanah,U.dkk (2008). Konsep Dasar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jilid 1. Jakarta: Depdiknas 2008
- Muhammad. (2004). Teori Penilaian dalam Akuntansi Syari'ah. MSI-UII.Net.
<file.upi.edu/ai.php>
- Mulawarman, Dedi, A. (2008). Paper.Eksistensi Laporan Nilai Tambah Syariah Berbasis Rezeki. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
<ajidedim.wordpress.com/tag/akuntansi/>
- Nasution, A.S. (2008). Akuntansi Syariah dalam sebuah tinjauan.<http://sanoesi.wordpress.com/2008/10/25/akuntansi-syariah-dalam-sebuah-tinjauan/>
- Norvadewi. (2007). Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). MAZAHIB Vol. IV, No. 2, Desember 2007
[http:// stain-samarinda.ac.id](http://stain-samarinda.ac.id)
- Okoye,U.A. (2008), Accounting ? The Three Main Functions of Accounting. Publication:Finance and InvestmentcommunityGeographic Code:1USA Date:Apr 27, 2008<http://www.thefreelibrary.com/Accounting>
- Oweiss, M.I (2003). Economic Thought of Ibn al-Qayyim.dalamHttp://:www.islamic-world.net/economics
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). (1995). Pedoman Cara Pembentukan BMT. Jakarta : PINBUK
- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siregar,B. (2009). Jurnal Pedoman Singkat Tentang Sistem dan Prosedur pendirian Baitul Maal-Wat Tamwil (BMT). Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Universitas Muhammadiyah Jakarta
<http://repository.usu.ac.id>
- Soetrisno Noer. (2004) Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Menuju Pemberdayaan Ekonomi
[.www.smecca.com/deputi7/file.../Baitullmal_Muhammadiyah.pdf](http://www.smecca.com/deputi7/file.../Baitullmal_Muhammadiyah.pdf)

- Sucipto. (2004). Penerapan Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan. Digitized by USU digital library library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi-sucipto4.pdf
- Sugiyono. (1999). Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Supriyono, R.A. (1993). Akuntansi Manajemen : Konsep Dasar Akuntansi Manajemen dan Proses Perencanaan. Yogyakarta: BPFE
- Tim P3UK. (1994). Paket Pelatihan Bagi Kelompok Swadaya Masyarakat
- Triyuwono, I. (2006). Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori. Jakarta: Rajawali Press
- Triyuwono, I. (2000). Organisasi dan Akuntansi Syariah. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta
- Umar, H. (1999). Metodologi Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran. Jakarta: Gramedia.
- Vredenburg, J. (1987). Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.
- Watkins, A. (2007). An Accountability View of Accounting: Some Guidance for Accounting Practice. CPA Journal http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5346/is_200702/ai_n21282651/?tag=content;coll